



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VI DPR RI**

**BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Rapat ke         | : | 5 (lima)  |
| Tahun Sidang     | : | 2021-2022   |
| Masa Persidangan | : | I   |
| Jenis Rapat      | : | Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika)   |
| Hari, Tanggal    | : | Senin, 23 Agustus 2021  |
| Pukul            | : | 10.00 WIB   |
| Sifat            | : | Terbuka   |
| Pimpinan Rapat   | : | Faisol Riza., S.S Wakil Ketua Komisi VI DPR RI  |
| Sekretaris Rapat | : | Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI   |
| Tempat           | : | Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar<br>Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270   |
| A c a r a        | : | Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan <i>ASEAN Agreement On Electronic Commerce</i> (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik)<br>1) Penjelasan Pemerintah<br>2) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi<br>3) Tanggapan/Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi<br>4) Pembahasan DIM RUU dan DIM Penjelasan   |
| Hadir            | : | 1. .... orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI;<br>2. a. Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi;<br>b. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard G Plate;<br>c. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga;<br>d. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Damos Dumoli Agusman;<br>c. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, H.R. Benny Riyanto;<br>d. Bapak/Ibu pendamping yang sudah bergabung di virtual beserta jajaran. |

## I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Luar Negeri atau yang mewakili dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili pada pukul 10.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Perdagangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM) pada hari Senin, 23 Agustus 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyetujui DIM I (Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Elektronik Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik), dan DIM II (Rancangan Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Elektronik Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik) Tetap.
2. Komisi VI DPR RI menyetujui Pembahasan Tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Elektronik Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik) Rancangan Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Elektronik Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik), dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dalam rangka pengambilan keputusan atas RUU tersebut.

### Catatan :

1. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan melalui system elektronik di kawasan ASEAN dari praktek yang merugikan.
2. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan data pribadi dalam transaksi system perdagangan elektronik
3. Pemerintah harus segera menyiapkan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital.
4. Pemerintah diminta melakukan sosialisasi secara intensif kepada para pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, UMKM, perguruan tinggi, industry, pemerintah daerah dan lain-lain.
5. Pemerintah diminta menyiapkan regulasi yang bisa menyelesaikan hambatan perdagangan elektronik.
6. Pemerintah diminta melakukan koordinasi dan kolaborasi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan transaksi perdagangan terutama di Kawasan ASEAN
7. Pemerintah diminta mengurangi biaya logistik dan transportasi sehingga produk Indonesia mampu bersaing dengan anggota negara ASEAN dengan konektivitas jalur distribusi barang dan jasa ke negara tujuan.
8. pemerintah diminta melakukan langkah-langkah terkait roadmap pemanfaatan kerjasama perdagangan di Kawasan ASEAN.

**III. PENUTUP.**

Rapat ditutup pada pukul 13.15 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**



**Faisol Riza., S.S**

**A-33**